



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2023 telah selesai disusun.

Buku ini berisi hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisa akuntailitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistimatis keberhasilan dan kegagalan, hambatan / kendala serta permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja. Penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2023, disusun dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini telah memuat langkah-langkah antisipatif untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun berikutnya serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di tahun yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di kabupaten Kebumen.

Kebumen, Januari 2023

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen

Haryono Wahyudi, ST. MT.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19740126 199903 1 004

DAFTAR ISI

Halaman Judul		i
Kata Pengantar		ii
Daftar Isi		iii
Daftar Tabel		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Gambaran Umum Organisasi	1
	1.2. Fungsi Strategis Organisasi	3
	1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi	3
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	6
	2.1. Perencanaan Strategis	6
	2.1.1. Rencana Strategis (Renstra)	6
	2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)	7
	2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis	8
	2.2. Perjanjian Kinerja	10
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	14
	3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	14
	3.1.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	15
	3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	17
	3.2. Realisasi Anggaran	20
BAB IV	PENUTUP	23
	4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja	23
	4.2. Permasalahan/Kendala	23
	4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang	25
LAMPIRAN		
1. Perjanjian Kinerja		
2. Anggaran dan Realisasi Belanja		

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 : Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
2. Tabel 2.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
3. Tabel 2.2 : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
4. Tabel 2.3 : Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
5. Tabel 2.4 : Target Sasaran Strategis Perangkat Daerah
6. Tabel 2.5 : Program/Kegiatan Tahun 2023
7. Tabel 3.1 : Capaian Kinerja tahun 2023
8. Tabel 3.2 : Evaluasi kinerja Tahunan
9. Tabel 3.3 : Evaluasi kinerja Tahunan Pelayanan SPM
10. Tabel 3.4 : Capaian indikator kinerja sasaran strategis BPBD s/d Tahun 2023
11. Tabel 3.5 : Realisasi Anggaran tahun 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum Organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang telah diperbaharui melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :

1. Kepala

BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri dari ketua dan anggota. Ketua unsur pengarah dijabat oleh Kepala BPBD, sedangkan anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di Daerah.

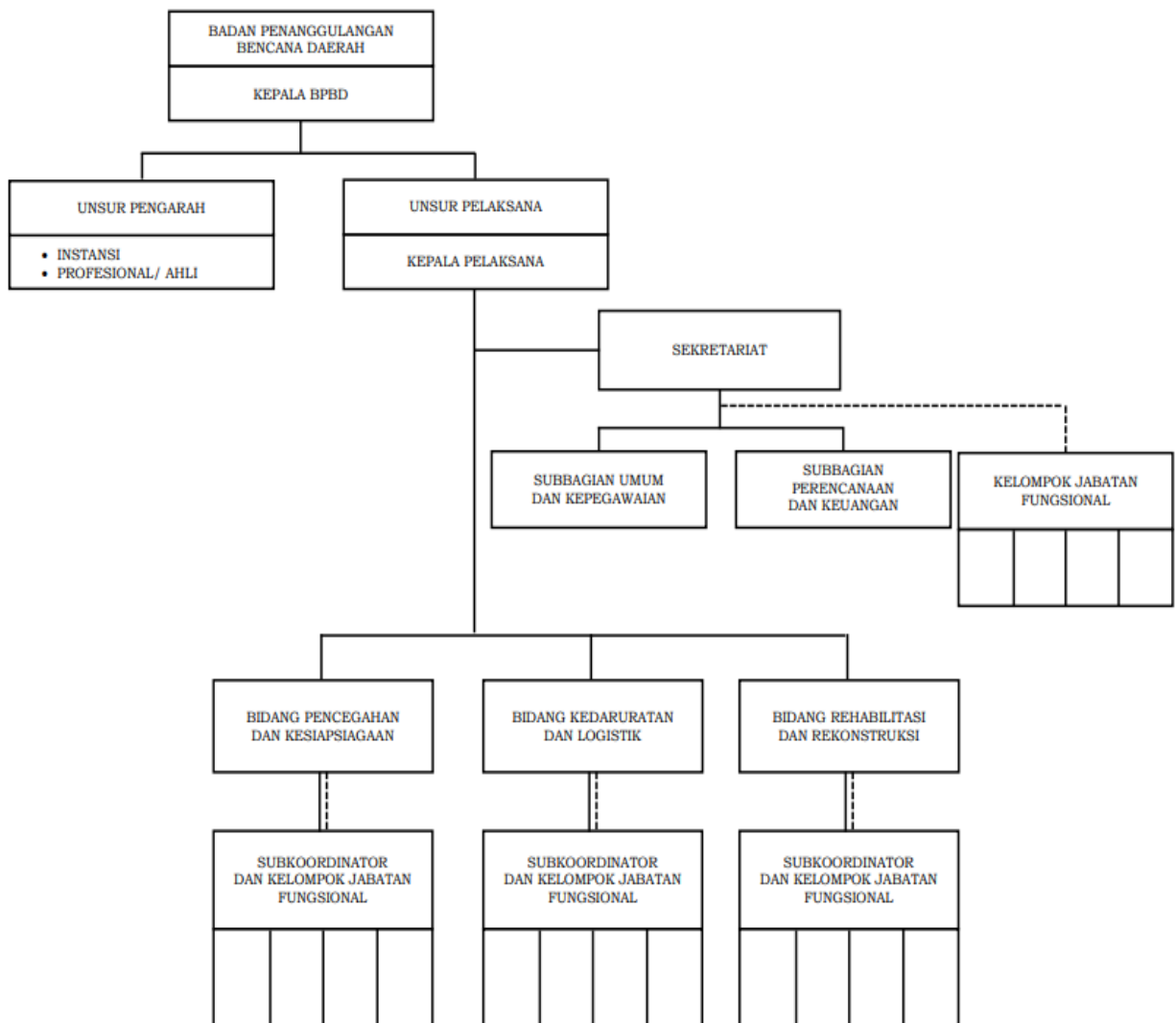
3. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor 8 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Pelaksana BPBD kabupaten Kebumen
2. Sekretariat
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a. Sub-Kordinator
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a. Sub-Kordinator
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a. Sub-Kordinator
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN ORGANISASI BPBD



1.2. Fungsi Strategis Organisasi

Berdasarkan undang-undang nomor 24 tahun 2007, Badan penanggulangan Bencana daerah terdiri atas unsur :

1. Pengarah Penanggulangan bencana, yang beranggotakan pejabat pemerintah terkait serta anggota masyarakat profesional dan ahli untuk :
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau; dan
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
2. Pelaksana penanggulangan bencana, yang beranggotakan tenaga profesional dan ahli mempunyai fungsi :
 - a. Fungsi koordinasi, adalah fungsi yang melekat pada unsur pelaksana BPBD Kabupaten untuk melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pascabencana dengan organisasi perangkat daerah terkait lainnya, termasuk BPBD Provinsi Jawa Tengah dan BNPB.
 - b. Fungsi komando, adalah fungsi Unsur Pelaksana BPBD dalam rangka penanganan darurat bencana melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari organisasi perangkat daerah lainnya.
 - c. Fungsi pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya, adalah fungsi Unsur Pelaksana BPBD menjadi pelaksana dalam penanganan tanggap darurat bencana dan pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

1.3. Permasalahan Utama yang dihadapi

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2018, Kabupaten Kebumen memiliki Skor 140,31 dengan katagori kelas Risiko Sedang. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kebumen masuk dalam urutan ke 293 dari 514 kabupaten di Indonesia. Secara temporal dari tahun 2015 hingga 2018, Kabupaten Kebumen mengalami penurunan Skor IRBI yang cukup signifikan, mulai dari 203,20 pada Tahun 2015, 165,76 pada Tahun 2016, 151,08 pada Tahun 2017, dan 140,31 pada Tahun 2018. Kondisi ini menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa, kapasitas Kabupaten Kebumen dalam upaya penanggulangan bencana terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan catatan sejarah kebencanaan, Kabupaten Kebumen sering mengalami berbagai bencana. Dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI, BNPB), bencana yang termasuk sering terjadi di Kabupaten Kebumen yaitu: banjir,

tanah longsor, puting beliung, dan kekeringan. Kejadian bencana tersebut menimbulkan dampak korban jiwa, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan/lahan yang besar, serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kebijakan nasional dalam rangka penanggulangan bencana yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan kerentanan bencana, peningkatan ketahanan iklim serta upaya peningkatan mitigasi perubahan iklim melalui pelaksanaan pembangunan rendah karbon. Sedangkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah Kebijakan pengelolaan sumberdaya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana Jawa Tengah tahun 2018-2023 ditujukan dalam rangka menuju perwujudan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang Jawa Tengah lestari dan berkelanjutan, serta adaptif bencana, dengan indikator tujuannya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Penerapan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen tentu saja tidak terlepas dari perkembangan lingkungan eksternal baik lokal/regional maupun tingkat nasional. Isu-isu strategis eksternal terkait penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.1. Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Nasional	Dinamika Regional Jawa tengah	Lain-lain
	<p>Dalam RPJMN 2020-2024 hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah:</p> <p>a. Perlunya penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;</p> <p>b. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;</p> <p>c. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;</p> <p>d. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;</p>	<p>a. Sebagian besar wilayah jawa tengah tinggal di daerah rawan bencana</p> <p>b. Belum semua daerah rawan bencana mempunyai alat system peringatan dini rambu petunjuk jalur evakuasi</p> <p>c. peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan utamanya</p>	<p>1. Perda RT/RW dan Dokumen KLHS belum dilaksanakan dengan baik, terkait Pembangunan pada Daerah Rawan Bencana.</p> <p>2. Dunia Usaha memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam penanggulangan bencana melalui CSR</p>

	<p>e. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;</p> <p>f. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan</p> <p>g. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.</p>	<p>pada fase pra dan pasca bencana</p> <p>d. masih perlunya sinergi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara lintas sektor dan lintas wilayah</p>	
--	---	--	--

Perwujudan yang mendasar dalam penerapan kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen adalah terbangunnya kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Tantangan berupa upaya pengurangan kemiskinan, kerusakan lingkungan, air bersih, serta isu perubahan iklim dengan kejadian kebencanaan yang semakin meningkat

Terbitnya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, dengan melibatkan unit perangkat daerah terkait kebencanaan, masyarakat dan dunia usaha.

Demikian juga dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang secara jelas telah mengatur tentang ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

BAB II.
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1. Rencana Strategis

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Bupati Kebumen terpilih, maka BPBD Kabupaten Kebumen menetapkan strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana berikut :

Tabel. 2.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah

Visi : Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat.			
Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 5.2: Mewujudkan Kondusifitas Wilayah	Sasaran 5.2.2 : Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Strategi 5.2.2 : Peningkatan desa tangguh bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan informasi kebencanaan yang Up-Date bagi warga yang berada di kawasan rawan bencana 2. Mengoptimalkan kegiatan Pra-Bencana melalui Pencegahan dan kesiapsiagaan dengan mengedepankan peran Pentahelix Penanggulangan Bencana (Pemerintah, Masyarakat, Dunia Usaha, Akademisi dan Media Massa) 3. Menyediakan Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana yang responsive. 4. Melaksanakan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana dengan selalu berkordinasi dengan stakeholder terkait dengan motto “ Build Back Better and Saver”

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Dalam rangka mencapai tujuan/sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, BPBD Kabupaten Kebumen memiliki Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Urusan	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada Tahun					Kondisi akhir RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Persentase Desa tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100	100

BPBD Kabupaten Kebumen yang menjadi salah pengampu urusan Trantibum limas, yaitu Sub-urusan Bencana, dalam pelaksanaan tugasnya adalah dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang telah di tentukan oleh kementerian Dalam negri terkait mutu pelayanan dan indikator kinerjanya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3

Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

No	Bidang/Urusan/Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Urusan Trantibum Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
1	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%

2.1.3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis.

Dalam rangka mencapai visi dan misi bupati Kebumen Tahun 2021-2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen menetapkan tujuan, sasaran beserta indikatornya yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Kebumen selama 5 tahun sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.3

Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Perkiraan Capaian 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
			Tar get	Rp 000,-	Tar get	Rp 000,-	Tar get	Rp 000,-	Tar get	Rp 000,-	Tar get	Rp 000,-	Tar get	Rp 000,-
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	100	100	8.038	100	10.665	100	11.359	100	12.166	100	12.550	500	54.780
<i>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana</i>	100	100	400.000	100	512.000	100	424.360	100	437.090	100	550.202	500	2.323.652
Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota	Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal		0	0	1	100.000	0	0	0	0	1	100.000	2	200.000
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100	400.000	100	412.000	100	424.360	100	437.090	100	450.202	500	2.123.652
<i>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>Persentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</i>		100	5.558.600	100	6.603.082	100	7.189.657	100	7.959.695	100	8.206.835	100	35.517.869
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal		0	0	2	150.000	0	0	2	150.000	0	0	4	300.000
Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)	Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota	jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan		100	50.000	125	75.000	200	100.000	200	100.000	200	100.000	825	425.000
Pengendalian operasi dan	Persentase jumlah Warga		100	350.000	100	360.500	100	371.314	100	382.453	100	393.926	100	1.858.193

penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Negara yang mendapat layanan pus dalops penang gulangan bencana dan sarana pra sarana penang gulangan bencana													
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah paket bagi Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan		1	325.000	1	325.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	5	1.700.000
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan terkelolanya risiko bencana kabupaten		12	250.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	50.000	60	450.000
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Prosentase pembentukan desa tangguh bencana		100	1.000.000	100	682.158	100	714.623	100	748.061	100	782.502	100	3.927.346
Penanganan Pascabencana Kabupaten /Kota	Jumlah penanganan pascabencana		5	3.433.600	5	4.642.423	5	5.266.910	5	5.823.545	5	6.155.101	25	25.321.579
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah anggota TRC yang mengikuti pelatihan		50	50.000	100	112.000	100	124.630	100	137.090	100	150.203	450	573.924
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi)		200	100.000	400	206.000	400	212.180	400	218.545	400	225.101	1800	961.827
<i>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>	<i>Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>		100	1.905.000	100	3.375.000	100	3.500.000	100	3.625.000	100	3.625.000	100	16.030.000
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penanganan darurat kebencanaan		100	1.405.000	100	2.725.000	100	2.775.000	100	2.825.000	100	2.825.000	100	12.555.000
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana		100	300.000	100	400.000	100	425.000	100	450.000	100	450.000	100	2.025.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah paket logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		2	200.000	2	250.000	2	300.000	2	350.000	2	350.000	10	1.450.000
<i>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan n Bencana</i>	<i>Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan bencana</i>		100	175.000	100	175.000	100	245.566	100	144.683	100	168.773	500	909.023

Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah regulasi penanganan kebencanaan tersusun		2	50.000	0	0	4	100.000	0	0	0	0	6	150.000
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana (Relawan)		2	50.000	2	75.000	2	45.566	2	44.683	2	68.773	10	284.023
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan		10	75.000	15	100.000	15	100.000	15	100.000	15	100.000	70	475.000

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja tahun 2023 Kepala Pelaksana BPBD kabupaten kebumen yang didalamnya memuat sasaran strategis yang akan dituju, serta Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Kebumen yaitu rencana pembentukan dan pembinaan desa tangguh bencana sebanyak 30 desa sebagaimana tabel berikut.

Tabel. 2.4
Target Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Triwulan			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	100% (30 Desa)	0	40% (12ds)	60% (18ds)	0

Anggaran yang di sediakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah serta indikator kinerja sasaran strategis, termuat dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.5

Program/Kegiatan Tahun 2023

	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.898.526.284
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.168.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.774.000
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	24.000.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.600.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.200.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.160.000
		Penyediaan Bahan/Material	40.000.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.973.000

7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000
		Pemeliharaan Mebel	2.000.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.251.000
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		5.439.657.000
7	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	385.180.000
8	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	435.740.000
		Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	350.000.000
		Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000
		Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	400.000.000
		Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
		Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	200.000.000
		9	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000		

		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000
10	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000
		Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000
		Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	814.500.000
		J U M L A H	9.338.183.284

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD kabupaten Kebumen tahun 2021-2026 ditempuh melalui program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu **Men-Tambeng** Kebumen Tanggap Bencana Program Peningkatan Kesiapsiagaan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, yang diwujudkan melalui kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana. Pembentukan Desa Tangguh Bencana di kabupaten Kebumen telah terlaksana pada 360 desa dan kelurahan, yang telah dinyatakan melalui keputusan Bupati Kebumen nomor 360/60 tahun 2021 tentang Klasifikasi Ketangguhan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kebumen.

Desa Tangguh Bencana yang telah terbentuk, tentu saja masih perlu dilakukan pendampingan dan ditingkatkan kapasitasnya, guna semakin menumbuhkan kemandirian desa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Target persentase desa tangguh bencana dalam RPJMD kabupaten Kebumen dari tahun 2021 s/d 2026 ditetapkan 100% setiap tahun, yaitu berdasarkan rencana pelaksanaan tiap tahunnya.

Pelaksanaan peningkatan kapasitas desa tangguh bencana di tahun 2023 mengalami penurunan baik dari sisi anggaran maupun jumlah desa yang dilaksanakan, yaitu pada tahun 2022 dapat terlaksana di 60 desa, sementara pada tahun 2023 hanya dapat dilaksanakan di 30 desa,

Tabel. 3.1. Capaian Kinerja tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Target		Realisasi
		murni	Perubahan	
1	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana 100%	30 desa	0 desa	30 desa (100%)

Evaluasi capaian Indikator kinerja Utama BPBD Kabupaten Kebumen apabila disandingkan dengan capaian tahun-tahun yang lalu sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2. Evaluasi kinerja Tahunan

No	Program Unggulan	Indikator Kinerja Utama	Realisasi sampai dengan				
			2019	2020	2021	2022	2023
	Men Tambeng	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	28,5%	33,33%	100%	100% (60ds)	100% (30ds)

3.1.2. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemenuhan Pelayanan Dasar pada urusan Trantibumlinmas, khususnya dalam Sub-Urusan Bencana daerah Kabupaten/Kota dilakukan dengan melaksanakan pelayanan dasar yang meliputi pelayanan informasi rawan bencana; pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, dengan capaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2. Capaian kinerja SPM-Sub Urusan Bencana

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN	TUNTAS PARIPURNA			100.00 %
1 .	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang terlayani	Yang Belum terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	726,453	726,453	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan	1	1	0	100.00 %

	bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana				
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	726.453	726.453	0	100.00 %
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	726,453	726,453	0	100.00 %
	4 . Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	54	54	0	100.00 %
2 .	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	1.084	1.084	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	100.00 %
	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana	425	425	0	100.00 %
	2 .Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	1084	1084	0	100.00 %
3 .	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)				100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	467	467	0	100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR				
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Tersedia	Jumlah Mutu Barang / Jasa Yang Belum Tersedia	
	1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	2	2	0	100.00 %

2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	467	467	0	100.00 %
3 . Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	2	2	0	100.00 %
4 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	467	467	0	100.00 %

Berdasarkan data pada tabel capaian kinerja SPM diatas, dapat dijelaskan bahwa Pemenuhan Atandar pelayanan Minimal (SPM) Sub- Urusan Bencana sebagai berikut :

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Pelayanan informasi rawan bencana adalah pelayanan informasi tentang bagian wilayah kabupaten/kota rawan bencana, kepada Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang berpotensi terpapar bencana. Cakupan kawasan rawan bencana adalah wilayah kabupaten/kota. Pelayanan informasi rawan bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain sebagai berikut: Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/Zoonosis Prioritas.

Dasar Pemikiran Informasi rawan bencana sangat penting diberikan kepada Warga Negara agar diketahui ancaman bencana dapat terjadi dan dapat membahayakan keselamatan manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Sasaran Pelayanan Informasi rawan bencana di kabupaten kebumen adalah penduduk yang berada di wilayah rawan bencana sejumlah 726.453 KK yang berada di 244 desa rawan bencana dengan risiko sedang dan tinggi. Jenis layanan dalam pelayanan Informasi Rawan bencana meliputi mutu layanan sebagai berikut :

- a. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana
- b. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana sebanyak 726.453 KK

- c. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kepada penduduk yg berada di wilayah rawan bencana melalui medsos BPBD (Twitter, Instagram, facebook, whatsapp dan radio RIG)
- d. Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana di 54 lokasi rawan bencana.

2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana adalah serangkaian kegiatan pra bencana melalui pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pemerintah daerah dan Warga Negara dalam menghadapi bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan dibagi per jenis ancaman bencana yang dirincikan antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas. Dasar Pemikiran. Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mengurangi dampak bencana, terutama korban jiwa manusia pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Jenis layanan dalam pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana meliputi mutu layanan sebagai berikut :

- a. Penyediaan Sarana prasarana penanggulangan bencana berupa 425 unit Alat Perlindungan Diri (APD).
- b. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan destana 600 orang, sekolah aman bencana 300 peserta, pelatihan TRC 40 orang, Gladi kebencanaan 400 orang dan Pelatihan relawan 100 orang.

3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi per jenis ancaman bencana antara lain: Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, Letusan Gunung Api, Gelombang Laut Ekstrim, Angin Topan (termasuk Siklon Tropis/Puting Beliung), Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Epidemii/Wabah Penyakit/*Zoonosis* Prioritas. Dasar Pemikiran Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana adalah bahwa Keselamatan jiwa manusia sangat penting dalam proses penanganan darurat bencana maka untuk itu dibutuhkan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana sesegera mungkin.

Jenis Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana meliputi mutu layanan sebagai berikut :

- a. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana dengan mengeluarkan 2 dokumen pernyataan darurat bencana oleh Bupati.
- b. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana terhadap 467 orang korban terdampak bencana.
- c. Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana atas 2 kali keadaan darurat bencana.
- d. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana terhadap 467 orang korban terdampak bencana.

Tabel. 3.3. Evaluasi kinerja Tahunan Pelayanan SPM

No	Bidang/Urusan/Indikator	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Urusan Trantibum Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota					
1	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	15,69%	68,3%	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	51,33%	68,01%	88,42%	100%	100%
3	Persentase jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis terhadap target dan realisasi capaian SPM Sub urusan bencana, sesuai dengan permendagri nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan minimal Sub-Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota, bahwa terhadap 3 (tiga) jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana, indikator capaiannya bersifat output yang dihasilkan setiap tahunnya, sehingga target capaian selalu menyesuaikan dengan rencana output yang dihasilkan dengan menyesuaikan pagu anggaran yang disediakan.

3.1.3. Capaian indikator kinerja sasaran strategis.

Indikator kinerja rencana strategis BPBD Kabupaten Kebumen sebagaimana yang terdapat dalam Renstra tahun 2021-2026 dalam program/kegiatan maupun sub-kegiatan, adalah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal sub-urusan bencana. Capaian indikator kinerja sasaran strategis pada BPBD Kabupaten Kebumen sampai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Capaian indikator kinerja sasaran strategis BPBD s/d Tahun 2023

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan Sub Kegiatan	Perkiraan Capaian 2020 (%)	Target Kinerja sasaran strategis					
			Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota	Presentase Cakupan pelayanan informasi rawan bencana	68,3	100	100	100	100	100	100
<i>Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase Penyelesaian Dokumen sampai dinyatakan sah/legal</i>	<i>1 dok (100%)</i>	<i>1dok</i>	<i>1dok</i>	<i>1dok</i>	<i>1 dok-</i>	<i>1dok</i>	<i>1dok-</i>
<i>Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)</i>	<i>Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</i>	<i>36,7%</i>	<i>207512 Org</i>	<i>207512 Org (100%)</i>	<i>726,453</i>	<i>726,453</i>	<i>726,453</i>	<i>726,453</i>
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase cakupan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	68,3	100	88,42	100	100	100	100
<i>Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal</i>	<i>1 dok (100%)</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>
<i>Pembuatan Rencana Kontinjensi (Renkon)</i>	<i>Persentase penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal</i>	<i>4 dok (100%)</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>1 dok</i>	<i>1 dok</i>

<i>Pelatihan pencegahan dan mitigasi Bencana Kabupaten/ kota</i>	<i>jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan</i>	2332 org	3930 org	3930 org (100%)	2902	2902	200	200
<i>Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana</i>	<i>Persentase jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pus dalops penang gulangan bencana dan sarana pra sarana penang gulangan bencana</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>	<i>Jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan perlindungan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah terkelolanya risiko bencana kabupaten</i>	6 kec	2 kec	2 kec (100%)	1 paket	1 paket	12 dok	12 dok
<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan</i>	<i>Prosentase pembentukan desa tangguh bencana</i>	33%	390 ds	390 ds (100%)	60ds	60ds	30ds	30ds
<i>Penanganan Pascabencana Kabupaten /Kota</i>	<i>Jumlah penanganan pascabencana</i>	1 paket	7 paket	7 paket (100%)	5paket	5 paket	1dok, 3pkt	1 dok, 3pkt
<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah anggota TRC yang mengikuti pelatihan</i>	0	50 org	50 org (100%)	50 org	50 org	100	100
<i>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</i>	<i>jumlah Warga Negara yang ikut pelatihan (Gladi)</i>	350 org	425 org	425 org (100%)	210	210	400	400
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase penanganan darurat kebencanaan</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi teradap kejadian bencana</i>	646 org (100%)	100%	244 org (100%)	22.099	22.099	467	467 (100%)

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah paket logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3 jenis	3 jenis	3 jenis (100%)	3 jenis	3 jenis (100%)	3 jenis	3 jenis (100%)
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulanga n bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	jumlah regulasi penanganan kebencanaan tersusun	0	2 dok	2 dok (100%)	n/a	n/a	n/a	n/a
Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah kegiatan penguatan kelembagaan bencana (Relawan)	0	3 keg	3 keg (100%)	12 bulan	12 bulan	2 kel	2 kel
Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Sekolah Aman bencana yang dilaksanakan	0	10 sek	0 sek (0%)	10 sekolah	10 sekolah	15 sek	15 sek

Analisis terhadap caapaian indikator kinerja sasaran strategis BPBD s/d Tahun 2023 diatas, terhadap pelaksanaan Program Penanggulangan Bencana yang terdiri atas 4 Kegiatan, dimana 3 kegiatan merupakan kegiatan utama dalam mendukung pencapaian SPM sub-urusan bencana yaitu kegiatan *Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana* serta 1 Kegiatan pendukung pelaksanaan Penanggulangan bencana yaitu *Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*. Pelaksanaan program/kegiatan BPBD Kabupaten Kebumen tahun 2023 telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target fisik yang di rencanakan (fisik tercapai 100%).

3.2. Realisasi Anggaran

BPBD Kabupaten Kebumen pada tahun 2023 melaksanakan 2 program yang terdiri dari 11 kegiatan, dan terbagi ke dalam 35 sub kegiatan dengan anggaran belanja langsung sebesar Rp.9.338.183.284,00 dengan realisasi sebesar Rp.9.013.307.006,00 (96,52%) dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Tahun 2023

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI			SISA	
			Keuangan		Fisik	(RP)	(%)
			(Rp)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.898.526.284	3.773.919.597	96,80	96,80	124.606.687	3,20%
I	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.923.000	99,52	100,00	77.000	0,48%
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.000.000	15.923.000	99,52	100,00	77.000	0,48%
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.803.942.284	2.704.979.604	96,47	96,47	98.962.680	3,53%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.609.168.284	2.510.502.597	96,22	96,22	98.665.687	3,78%
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	194.774.000	194.477.007	99,85	99,85	296.993	0,15%
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00	-	0,00%
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	24.000.000	100,00	100,00	-	0,00%
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	236.960.000	235.668.443	99,45	99,46	1.291.557	0,55%
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.600.000	5.422.000	96,82	96,82	178.000	3,18%
6	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.000.000	47.744.650	99,47	99,47	255.350	0,53%
7	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23.200.000	23.122.100	99,66	99,66	77.900	0,34%
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	2.160.000	2.157.000	99,86	99,86	3.000	0,14%
9	Penyediaan Bahan/Material	40.000.000	39.447.300	98,62	98,62	552.700	1,38%
10	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	118.000.000	117.775.393	99,81	99,81	224.607	0,19%

V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	20.000.000	19.884.800	99,42	99,42	115.200	0,58%
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	19.884.800	99,42	99,42	115.200	0,58%
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	182.373.000	172.954.776	94,84	94,83	9.418.224	5,16%
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.400.000	2.204.000	91,83	91,83	196.000	8,17%
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	101.193.676	91,99	91,99	8.806.324	8,01%
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.000.000	23.753.000	98,97	98,97	247.000	1,03%
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	45.973.000	45.804.100	99,63	99,63	168.900	0,37%
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	615.251.000	600.508.974	97,60	97,61	14.742.026	2,40%
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	300.000.000	286.621.574	95,54	95,54	13.378.426	4,46%
16	Pemeliharaan Mebel	2.000.000	1.995.000	99,75	99,75	5.000	0,25%
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.000.000	7.995.000	99,94	99,94	5.000	0,06%
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	305.251.000	303.897.400	99,56	99,56	1.353.600	0,44%
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.439.657.000	5.239.387.409	96,32	96,32	200.269.591	3,68%
VIII	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	460.180.000	457.990.215	99,52	99,52	2.189.785	0,48%
20	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	74.494.500	99,33	99,33	505.500	0,67%
21	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	385.180.000	383.495.715	99,56	99,56	1.684.285	0,44%
IX	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.685.740.000	1.667.831.748	98,94	98,94	17.908.252	1,06%

22	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	49.617.400	99,23	99,23	382.600	0,77%
23	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	98.859.000	98,86	98,86	1.141.000	1,14%
24	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	435.740.000	427.277.623	98,06	98,06	8.462.377	1,94%
25	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	350.000.000	345.955.800	98,84	98,84	4.044.200	1,16%
26	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	50.000.000	49.432.700	98,87	98,87	567.300	1,13%
27	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	400.000.000	397.789.125	99,45	99,45	2.210.875	0,55%
28	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.409.900	99,41	99,41	590.100	0,59%
29	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200.000.000	199.490.200	99,75	99,75	509.800	0,25%
X	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.329.237.000	2.167.282.545	93,05	93,05	161.954.455	6,95%
30	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	2.029.237.000	1.993.671.156	98,25	98,25	35.565.844	1,75%
31	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	73.739.989	36,87	36,87	126.260.011	63,13%
32	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	99.871.400	99,87	99,87	128.600	0,13%
XI	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	964.500.000	946.282.901	98,11	98,12	18.217.099	1,89%
32	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	72.915.900	97,22	97,22	2.084.100	2,78%
34	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	75.000.000	74.787.700	99,72	99,72	212.300	0,28%
35	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	814.500.000	798.579.301	98,05	98,05	15.920.699	1,95%
	JUMLAH	9.338.183.284	9.013.307.006	96,52	96,52	324.876.278	3,48%

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Penyerapan anggaran belanja APBD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Kebumen tahun 2023 sebesar 96,52%, realisasi capaian indikator kinerja Utama (IKU) tercapai 100%, demikian juga realisasi capaian program Penanggulangan Bencana juga tercapai 100%. Berdasarkan data tersebut maka efisiensi penggunaan sumber daya dapat diketahui dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran, yaitu 3,48%

BAB IV

PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang didalamnya memuat Indikator Kinerja Utama dan indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Capaian indikator kinerja sasaran strategis perangkat daerah melalui pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2023 secara umum sudah terlaksana dengan baik, terlihat dengan capaian realisasi belanja sebesar 96,52%.
- b. Capaian Indikator kinerja utama perangkat daerah sampai dengan tahun 2023, yaitu pembentukan desa tangguh bencana dari target sasaran pelaksanaan sejumlah 30 desa, telah tercapai semua sebanyak 30 desa (100%).
- c. Pelaksanaan tanggap darurat bencana di kabupaten kebumen sudah terlaksana dengan baik karena dukungan Anggaran APBD kabupaten Kebumen, baik melalui anggaran yang telah direncanakan dalam BPBD Kabupaten Kebumen, maupun anggaran yang bersumber dari BTT yang dipergunakan dalam penanganan darurat pada tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui pernyataan darurat oleh Bupati Kebumen, serta anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat (BNPB) melalui penggunaan Dana Siap Pakai (DSP).
- d. Upaya penanganan bencana pada tahap pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga sudah semakin baik, yang di sebabkan politikal will dari pemerintah daerah sendiri terkait kebijakan penanganan pasca bencana, serta sudah adanya koordinasi yang baik antar perangkat Daerah lainnya dalam hal penentuan lokasi kegiatan dan pembagian kewenangan penanganannya.

4.2. Permasalahan/Kendala

Permasalahan/kendala utama yang terjadi dalam pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2023 di BPBD Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

- a. Permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten kebumen didalam menyelenggarakan fungsi penanggulangan bencana dari sisi Sumber Daya Manusia adalah masih terbatasnya pegawai yang memiliki kapasitas yang diperlukan baik dari sisi perencanaan kegiatan kebencanaan dan pelaksanaannya, penyusunan regulasi sebagai turunan perda penanggulangan bencana yang sudah

- ada. Selain itu BPBD kabupaten kebumen juga masih sangat kekurangan pegawai/staff guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif.
- b. Desa tangguh bencana yang telah dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen sebanyak 460 desa/kelurahan masih merlu ditingkatkan dari sisi kualitas, yang disebabkan sosialisasi dan pelatihan destana yang telah dilakukan hanya kepada perwakilan unsur masyarakat dalam desa yang menjadi sasaran pelatihan.
 - c. Dukungan Anggaran dari Desa dalam rangka penanganan bencana masih perlu ditingkatkan, mengingat anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana melalui BPBD kabupaten kebumen yang masih minim jika di dibandingkan dengan luasnya wilayah yang berada di kawasan rawan bencana.
 - d. Pelaksanaan kegiatan kedaruratan akan mengalami kendala manakala terjadi musibah/bencana yang cukup masif dan meluas salah satunya personil yang terspesialisasi / memiliki keahlian spesifik untuk penyelamatan dan evakuasi, ini disebabkan karena keterbatasan personil BPBD, PUSDALOPS serta relawan yang pada kondisi tanggap darurat untuk di dorong menjadi POSKO Lapangan serta untuk melaksanakan kaji cepat untuk menghitung kerugian dan kerusakan yang di akibatkan bencana.
 - e. Pelaksanaan Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana terkendala pada penanganan infrastruktur yang bukan merupakan kewenangan desa atau kabupaten, dimana kerusakan tersebut tidak bisa langsung diperbaiki secara permanen, mengingat bukan kewenangannya, padahal masyarakat sebagai pengguna infrastruktur berkeinginan agar kerusakan segera dapat diperbaiki.
 - f. Pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) sub urusan bencana masih sangat memerlukan dukungan anggaran dan sumber daya manusia, yang disebabkan hampir semua hazard bencana ada di wilayah Kabupaten Kebumen, kecuali Gunung Meletus.
 - g. Pendataan penduduk yang berada/tinggal di kawasan yang memiliki risiko bencana sedang dan tinggi, belum sesuai dengan permendagri nomor : 101 tahun 2018, dimana pendataan terhadap penduduk yang berada di wilayah rawan bencana harus by name by adres.

- h. Titik titik lokasi rawan bencana belum seluruhnya terdata dan belum terpasang alat peringatan dini, maupun papan rambu informasi kebencanaan.

4.3. Strategi Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Dengan melihat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, khususnya yang terkait dengan hambatan-hambatan yang ditemui serta agar lebih meningkat kinerjanya di tahun yang akan datang perlu ditempuh beberapa hal berikut ini :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai Renstra dengan lebih mencermati sasaran dan pelaksanaan kegiatan, serta waktu pelaksanaannya sehingga pelaksanaan kegiatan menjadi semakin efektif.
2. Sinkronisasi kebijakan dan program yang ditetapkan baik oleh pemerintah Kabupaten Provinsi maupun Pusat.
3. Mengelola sarana prasarana dan SDM yang dimiliki dengan maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
4. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi rutin tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran kas dan RKO masing masing kegiatan.
5. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB), Organisasi Relawan Kebencanaan lainnya guna mengembangkan pengelolaan kebencanaan.
6. Mendorong desa untuk mengalokasikan dana penanggulangan bencana melalui APBDesa untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBD Kabupaten.